

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG BANDAR SAKTI (TAHUN ANGGARAN 2008)**

**Oleh**

**A G U S S E T I A N A**

APBDes/APBK adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam bentuk angka-angka rupiah di satu pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa/kampung.

Pemerintah Kampung Bandar Sakti menghadapi berbagai masalah dalam Implementasi Kebijakan Angaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) guna meningkatkan pembangunan kampung dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya yaitu masalah pelaksanaan pembangunan kampung yang kurang maksimal. Di Kampung Bandar Sakti, pembangunan fisik yang ada sangat minim sebagai akibat keterbatasan pembiayaan. Selain itu juga fasilitas yang digunakan dalam proses implementasi tersebut kurang memadai.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

Bandar Sakti dalam meningkatkan Pembangunan Kampung beserta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses implementasinya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang mengambarkan dan menjelaskan tentang Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Bandar Sakti dalam meningkatkan pembangunan Kampung. Jenis data yang digunakan adalah data primer, meliputi wawancara mendalam untuk berusaha mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa, proses Implementasi Kebijakan Pemerintah Kampung Bandar Sakti dalam meningkatkan pembangunan Kampung belum terlaksana secara optimal, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat proses implementasi. Faktor yang menghambat proses implementasi kebijakan tersebut yaitu, masalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh kampung. Dana yang diberikan untuk pembangunan kampung sangat minim. Serta kurang memadainya fasilitas sarana dan prasarana. Dan faktor pendukung dalam proses implementasi tersebut adalah adanya komunikasi yang baik antara perangkat kampung dengan masyarakat setempat mengenai program-program kebijakan, adanya sumber daya manusia yang memadai, adanya wewenang dan kesadaran yang dimiliki oleh perangkat kampung untuk menjalankan tupoksinya masing-masing serta adanya koordinasi yang baik antara aparatur kampung sebagai pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, pembangunan kampung.

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF POLICY OF VILLAGE BUDGET IN IMPROVING BANDAR SAKTI VILLAGE DEVELOPMENT (BUDGETARY FISCAL YEAR 2008)**

**By**

**A G U S S E T I A N A**

APBDes/APBK is annual operational plan of village government common program that clarified and translated in rupiah numbers for one side have estimate of village monetary expenditure highest limit.

Bandar Sakti Government faces some problems in implementation of Revenue and Expenditure Budget Policy village (APBK) in order to promote development in the organization of village duties of village development implementation problems that do not maximal. In Kampung Bandar Sakti, the existing physical development is very minimal as a result of funding limitations. In addition, facilities used in the implementation process is inadequate.

Intention of this research is to give clearly description about implementation policy of Bandar Sakti village budget in improving village development with supporting factors and pursuing the implementation process. method used in this research is

descriptive qualitative method. where will be depicted and explained about implementation policy of Bandar Sakti village budget in improving village development. data type used is primary data, covering indepth interview to try explain problems that happened.

Based on the data analysis, that implementation policy of village budget in village development have implemented but not yet optimal, this matter is influenced by some factors that pursuing implementation policy process that is problem of fund limitation is had by village government. Funds provided for construction of the village is very minimal. And also less adequate of facilities tool and infrastructure. And supporting factors in the implementation process is good communication between the device and the village with the local community about the policy programs, the existence of adequate human resources, authority and presence awareness device owned by the village to carry out their respective tupoksinya and coordination between village officials as policy implementers in the implementation of policy.

Keyword : implementation policy of village budget, village development